Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.1, Mei 2025, pp. 267 - 275
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB ■ page 267

PEMERINTAH DAN LITERASI KEUANGAN: PERAN PENTING DEMI MASA DEPAN FINANSIAL UMKM BERBASIS OVOP

Arina Hidayati[1], Tabah Rizki[2,] Triyono[3],
[1]Universitas Horizon Indonesia
Karawang, 0811-8454-800, e-mail: arina.hidayati.krw@horizon.ac.id
[2] Universitas Horizon Indonesia
Karawang, 0811-8454-800, e-mail: tabah.rizki.krw@horizon.ac.id
[2]Universitas Horizon Indonesia
Karawang, 0811-8454-800, e-mail: triyono.triyono.krw@horizon.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 May 2025
Received in revised form 9 May 2025
Accepted 20 May 2025
Available online 31 May 2025

ABSTRACT

The poverty rate in Batang Regency remains high. One of the government's strategies to address this issue is through the implementation of the One Village One Product (OVOP) program, which aims to develop and promote distinctive products from each MSME across regions. However, a major weakness identified in the OVOP program is the limited access to capital among MSME owners, which constitutes a significant responsibility for the government. Strengthening MSME business capital can be achieved through loan facilitation and improved financial management practices, particularly by enhancing financial literacy. This study, based on a literature review with a qualitative approach, utilizes primary and secondary data from various sources. The findings reveal that OVOP-based MSMEs in Batang Regency demonstrate financial literacy rates as follows: (1) 50–70% possess knowledge of financial recording and management, and (2) a portion has systematically recorded business income and expenses. While these two aspects of financial literacy are relatively well adopted, knowledge related to financial access remains under 60%. The government's role in promoting financial literacy has so far been limited to educational and socialization activities, which have not been conducted consistently or sustainably

Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises Financial Literacy, One Village One Product, Government Accounting Standards, Financial Accounting.

Abstrak

Angka kemiskinan di Kabupaten Batang tetap tinggi. Salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah melalui implementasi program One Village One Product (OVOP) yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan produk khas dari masing-masing UMKM lintas daerah. Namun, kelemahan utama yang diidentifikasi dalam program OVOP adalah terbatasnya akses ke modal di antara
Pemilik UMKM, yang merupakan tanggung jawab yang signifikan bagi pemerintah. Penguatan modal usaha UMKM dapat dicapai melalui fasilitasi pinjaman dan peningkatan praktik pengelolaan keuangan, terutama

Received May 1, 2025 Revised May 9, 2025; Accepted May 20, 2025

dengan meningkatkan literasi keuangan. Penelitian ini berdasarkan tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif ini memanfaatkan data primer dan sekunder dari berbagai sumber. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa UMKM berbasis OVAN di Kabupaten Batang menunjukkan tingkat literasi keuangan sebagai berikut: (1) 50–70% memiliki pengetahuan tentang pencatatan dan pengelolaan keuangan, dan (2) sebagian telah mencatat pendapatan dan pengeluaran bisnis secara sistematis. Meskipun kedua aspek literasi keuangan ini relatif diadopsi dengan baik, pengetahuan terkait akses keuangan tetap di bawah 60%. Peran pemerintah dalam mempromosikan literasi keuangan selama ini terbatas pada kegiatan pendidikan dan sosialisasi, yang belum dilakukan secara konsisten atau berkelanjutan

Kata kunci: Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahLiterasi Keuangan, Satu Desa Satu Produk, Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntansi Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri, kondisi pandemi Covid 19 menyebabkan banyak negara, bahkan daerah mengalami imbas buruk. Dampak terburuk sangat kentara dalam hal laju ekonomi yang cenderung mengalami penurunan selama masa tersebut. Salah satu Kabupaten yang mengalami dampak buruk Covid 19 adalah Kabupaten Batang. Kabupaten Batang menjadi salah satu daerah yang mengalami kondisi kemelaratan setelah pandemi covid. Tabel 1, menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin di Batang dibandingkan dengan persentase target penduduk miskin nasional memiliki selisih sebesar 0,59. Angka tersebut berarti Kabupaten Batang belum mampu memenuhi capaian Nasional dalam penurunan angka kemiskinan. Persentase tersebut diikuti dengan Capaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang yang dinilai belum mampu memenuhi persentase capaian minimal pertumbuhan ekonomi Nasional. Selain itu bukti tingginya persentase pada masyarakat Kabupaten Batang.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batang dalam menurunkan tingkat kemiskinan yakni mengusung program unggulan berupa OVOP merupakan salah satu program mulai dikenalkan melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6, tahun 2007 guna menciptakan industrialisasi desa melalui pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha produktif (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, 2018). Program ini bertujuan untuk mendorong setiap desa atau wilayah agar dapat mengembangkan produk unggulan lokal untuk bersaing di ranah global, meningkatkan kemandirian dan kreativitas serta meningkatkan Sumber Daya yang dimiliki (Claymone & Jaiborisudhi, 2011); (Thanh et al. 2018)). OVOP dinilai dapat meningkatkan ikon kekhasan sebuah produk yang dapat disandingkan dengan pengembangan e-commerce (Ndione & Suzuki, 2019). Dilansir dari pendapat kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Koperasi Kabupaten Batang, melalui program OVOP tersebut diharapkan pada akhir periode RPJMD masing-masing desa.

Tabel 1. Perbandingan Rasio Perubahan Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dengan Capaian Nasional Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
PE Batang	5,72	5,39	-1,29	4,88	5,97
PE Nasional	5,17	5,41	1,9	2,54	5,93
Miskin Batang	8,69	8,35	9,13	9,68	8,98
Miskin Nasional	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57

Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Saat ini Kabupaten Batang telah memiliki 8 UMKM yang menghasilkan produk unggulan dan terdaftar dalam masing-masing daerah sebagai bagian dari OVOP. Namun 8 daerah potensial ini belum secara optimal dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk memproduksi barang disebabkan oleh modal usaha yang minim (Hidayati, 2020). Modal usaha dapat ditingkatkan melalui literasi keuangan(Prakoso, 2020); (Rumbianingrum & Wijayangka, 2018). Literasi Keuangan merupakan suatu bentuk pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, dimana ketiganya memengaruhi sikap dan perilaku guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Edukasi literasi keuangan menjadi sorotan pada program pemerintah, hal ini dikarenakan tingkat literasi keuangan di Indonesia cenderung rendah

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

yakni 38%. Belum lagi ditambah dengan kredit macet dan pinjaman serta judi online yang menyebabkan penurunan tingkat ekonomi masyarakat (Kemendikbudristek, 2024).

(Moneysense et al., 2005) menyebutkan literasi keuangan sebagai "kemampuan individu untuk membuat penilaian yang tepat dan mengambil keputusan yang efektif dalam mengelola keuangan mereka". Dalam mengukur literasi keuangan, penelitian mencakup 3 area berikut inidefinisi operasional parameter indeks literasi keuangan yang terdiri dari :

Tier I - Basic Money Management (budgeting, spending, saving, loans and credit facilities);
Tier II - Financial Planning/Retirement Planning; and
Tier III - Investment Know-How

Pendapat lain disebutkan oleh (Departemen Literasi dan Keuangan OJK, 2021) bahwa literasi keuangan terbagi menjadi lima parameter, pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku.

Tabel 2. Parameter Literasi Keuangan

Parameter	Rincian	*Literate_1*
(1)	(2)	(3)
Pengetahuan	Pengetahuan terhadap Lembaga Jasa Keuangan	√ (Tahu minimal 1)
	Pengetahuan terhadap Produk/Layanan Jasa Keuangan	√ (Tahu minimal 1)
	Pengetahuan terhadap Karakteristik Produk/Layanan Jasa Keuangan	√ (Tahu minimal 1)
	Pengetahuan terhadap *Delivery Channel*	√ (Tahu minimal 1)
Keterampilan	Pernyataan Kemampuan Menghitung	√ (Tahu minimal 1)
	Konsep Aritmatika Sederhana	√
Keyakinan	Keyakinan terhadap Lembaga Jasa Keuangan	√ (Tahu minimal 1)
	Keyakinan terhadap Kemampuan Pengelolaan Keuangan	√ (*Top three answers*)
Sikap	Tujuan Keuangan	√
Perilaku	Upaya Mencapai Tujuan Keuangan	√

Sumber : (Departemen Literasi dan Keuangan OJK, 2021)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literasi Keuangan

Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 96,53% di tahun 2024 (Noorzhafirah, 2024). Literasi keuangan merupakan Literasi keuangan bertujuan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan dan pengelolaan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Departemen Literasi dan Keuangan OJK, 2021). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan merujuk pada pemahaman, kemampuan, dan kepercayaan diri yang membentuk sikap serta tindakan individu dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak dan berkualitas.. Indikator sikap keuangan yakni sikap terhadap tabungan seperti pentingnya menabung secara teratur, sikap pada investasi yakni mengenai ketertarikan seseorang pada investasi dan kesiapan dalam pengambilan risiko, sedangkan sikap terhadap pengeluaran adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan uang yang dimiliki (Wijaya et al., 2024). Disebutkan (Veriwati et al., 2021),(Rumbianingrum & Wijayangka, 2018) beberapa ukuran sesorang dikatakan memiliki tingkat pengetahuan keuangan yang baik yakni : Basic Financial Literacy dan Advance financial literacy. Sesorang dikatakan memiliki pengetahuan dasar dalam literasi keuangan apabila memahami syarat pembukaan bank, mengerti produk keuangan formal, melakukan cek rekening bank, memahami konsep inflasi, diskon, dan value of money. Sedangkan kemampuan advance dari literasi keuangan adalah pada saat seseorang memahami investasi keuangan seperti saham, obligasi serta mengerti bunga yang ditetapkan.

Literasi keuangan merupakan aspek krusial bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola keuangan usaha secara efektif. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM (Rahmawati, D., & Astuti, 2022). Selain itu penelitian lain menyebutkan bahwa literasi keuangan berfungsi sebagai alat transisi dan adaptasi bagi UMKM (Layli et al., 2024). Alinsari (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan dalam pembukuan sederhana mening katkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan strategi bisnis untuk mencapai usaha yang berkelanjutan

2.2. One Village One Product

Program OVOP merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga serta memperkuat ekonomi daerah, melalui pengembangan produk-produk khas daerah yang memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2014).

Di Indonesia, konsep OVOP mulai diperkenalkan sejak tahun 2007, didasari oleh beberapa pertimbangan utama: pertama, tingginya konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan; kedua, perlunya mendorong kembali pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan; dan ketiga, keinginan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2014) kriteria daerah yang dipilih sebagai daerah yang dapat menjalankan program OVOP harus mempertimbangkan faktor berikut: (1) adanya kesetaraan regional program OVOP. Artinya dukungan program OVOP tidak boleh berkonsentrasi pada area tertentu, melainkan harus didistribusikan dengan baik pada seluruh wilayah. (2) ketersediaan infrastruktur, artinya kesuksesan program OVOP sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dukungan dari pemerintah dan UMKM lain. (3) ketersediaan penyedia layanan, artinya program OVOP sangat dipengaruhi oleh penyedia akses layanan pengembangan bisnis, keuangan dan aspek lain. (4) keanekaragaman dan keunikan produk. Program OVOP mengutamakan produk yang memiliki keunikan lokal yang kuat dan potensi pasar yang besar. Artinya program OVOP harus mempertimbangkan variasi produk atau layanan yang dikembangkan secara khusus. (5) Kelembagaan dan Praktik Terbaik dari program OVOP. Keberhasilan implemetasi program OVOP sangat dipengaruhi oleh dukungan Lembaga Pendampingan (dalam hal ini di Indonesia DISPERINDAGKOP). (6) Dukungan dari pemerintah daerah. Dukungan dari pemerintah daerah dapat dievaluasi dari beberapa kriteria berikut: visi kepala daerah yang sejalan dengan program OVOP, pemahaman dan dukungan terhadap OVOP, efektivitas kepemimpinan, dan kesediaan pemerintah daerah untuk membentuk komite penyelenggara program OVOP.

Mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, pelaksanaan serta pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis pada konsep One Village One Product (OVOP) harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain mencakup jenis produk, standar mutu produk, ketentuan bagi pelaku IKM, serta jumlah sampel produk yang disiapkan (Rakhmawati, 2019). Lebih lanjut, Rakhmawati menyatakan bahwa produk yang diusung dalam program OVOP perlu memenuhi persyaratan umum, yaitu memiliki ciri khas atau kearifan lokal yang unik, memiliki peluang untuk menembus pasar ekspor, serta diproduksi secara konsisten dan berkelanjutan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Alasan yang memperkuat peneliti adalah tujuan penelitian ini hendak menganalisis data melalui berbagai sumber yang diambil secara relevan. Hamzah (2020) mengungkap metode kepustakaan adalah kegiatan analisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang tepat. Guna mendapatkan hasil penelitian yang akurat, peneliti menggunakan tahapan penelitian kepustakaan menurut Berg & Lune (2009, Cahpter 2). Berg & Lune (2009, Cahpter 2) menyebutkan terdapat empat komponen agar penelitian dapat teruji tingkat kredibilitas, yakni : 1) penentuan topik penelitian sementara, (2) Menyusun perencanaan strategi penelitian, 3) menggali informasi untuk penelitian terkait, 4) menulis kajian literatur.

Awalnya peneliti memilih topik permasalahan, dalam hal ini berkaitan dengan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan untuk UMKM berbasis OVOP guna Kesehatan keuangan. Pemilihan topik dilakukan melalui studi fenomena dari jurnal, media massa serta dokumen lain yang mendukung. Selanjutnya, pada Langkah kedua, peneliti menyusun beberapa rancangan strategi penelitian melalui penentuan fokus penelitian. Dalam hal ini, fokus penelitian yang digunakan adalah proses literasi keuangan pada penelitian ini sesuai dengan (Moneysense et al., 2005) yakni Tahapan pertama dalam literasi keuangan berupa Basic Money Management (Penganggaran, Pengeluaran, Tabungan, Pinjaman dan Kredit).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dampak literasi keuangan terhadap kondisi keuangan UMKM berbasis OVOP

Pada mulanya, peneliti mengidentifikasi jenis UMKM berbasis OVOP yang tercatat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) pada Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil wawancara terhadap kepala DISPERINDAGKOP bagian UMKM, ditemukan 55 jenis usaha yang tercatat memiliki standarisasi OVOP (Bapelitbang, 2015). Sedangkan peneliti mengambil fokus objek pada UMKM berbasis OVOP yang memiliki sentra industri daerah, yakni Industri Kulit Masin pada Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang untuk ditemukan kemampuan dan pemahaman mereka terhadap literasi keuangan. Alasan menggunakan satu UMKM tersebut adalah bahwa UMKM ini telah mewakili kondisi UMKM berbasis OVOP yang terdapat di Kabupaten Batang. Pasalnya, UMKM ini termasuk salah satu ikon yang cukup unggul dari Kabupaten Batang dan telah sesuai dengan standarisasi produk berbasis OVOP yang ditetapkan (Bapelitbang, 2015).

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Ukuran dasar mengenai literasi keuangan pada individu maupun unit usaha terletak pada pengetahuan terkait dengan pengelolaan keuangan, pengeluaran keuangan, tabungan, kredit dan pengajuan pinjaman serta pengetahuan terkait digitalisasi keuangan (Chen, H., & Volpe, 1998). Hasil penelitian yang ditemukan pada UMKM berbasis OVOP tertera pada Tabel 4. Tabel 4 menjelaskan hasil penelitian mengenai literasi keuangan dan dampak bagi perusahaan dengan indikator penilaian yang bersumber dari Tabel 2 menurut (Departemen Literasi dan Keuangan OJK, 2021).

Tabel 5 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan keuangan pada UMKM Kerajinan Kulit Masin Warungasem masih sangat sederhana. Proses pencatatan ini masih belum sesuai dengan Stamdar Akuntansi Keuangan EMKM (SAK EMKM). SAK EMKM adalah bentuk pedoman pencatatan akuntansi keuangan untuk usaha yang memiliki kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar, pada laporan keuangan sesuai SAK EMKM memuat informasi yang berupa : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Artinya apabila suatu UMKM belum melakukan pencatatan keuangan seperti di atas, menunjukkan bahwa pencatatan laporan keuangan belum sesuai dengan standar SAK EMKM. Berdasarkan hasil evaluasi peneliti, pencatatan keuangan yang masih belum sesuai ini dipengaruhi oleh kemampuan literasi keuangan yang sangat kecil. Pasalnya, salah satu pemilik usaha yakni Pak Zubadi masih bingung untuk membuat laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Sriningsih et al., 2024) bahwa tingkat literasi keuangan memiliki dampak yang nyata terhadap cara individu atau pelaku usaha dalam mengelola keuangannya.

Tabel 3. Hasil Penelitian yang ditemukan pada UMKM berbasis OVOP

No.	Indikator Penilaian	Hasil Penelitian
1	Keterampilan Pencatatan dan pengelolaan keuangan	Beberapa UMKM berbasis OVOP membuat laporan sederhana terkait dengan pemasukan dan pengeluaran uang yang diterima. Bentuk pencatatan yang ditunjukkan diolah peneliti pada Tabel 5.
2	Pengetahuan melakukan manajemen kas, dan Kemampuan perencanaan keuangan	UMKM telah mencatat bagian dari Laporan Kinerja yakni Pendapatan (Penghasilan) dan Beban
3	Kemampuan melakukan pembukuan sederhana	56% UMKM telah melakukan pencatatan secara terpisah antara keuangan pribadi dan usaha (Dewi et al., 2025)
4	Pengetahuan terkait akses keuangan dan bank	60% UMKM di Kabupaten Batang, Pekalongan dan Pemalang belum memiliki akses keuangan (Wachyu & Winarto, 2020)
5	Pengetahuan terkait digitalisasi keuangan	Permasalahan utama pada UMKM berbasis OVOP adalah ketidaktahuan pemilik atas digitalisasi, baik itu untuk keuangan maupun pemasaran (Ekaristi et al., 2023; Hidayati, 2020)

Sumber : Data penelitian, diolah

Tabel 4. Bentuk Catatan Keuangan UMKM Kerajinan Kulit Masin Warungasem Batang

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan	
Penjualan Produk Kulit	3.250.000
Total Pendapatan	3.250.000
Beban/Pengeluaran	
Bahan Baku Kulit	1.500.000
Benang dan Lem	500.000
Listrik dan Air	300.000
Total Pengeluaran	2.300.000
Laba Bersih	**950.000**

Sumber : Data penelitian, diolah

Pengetahuan UMKM Kerajinan Kulit Masin Warungasem mengenai manajemen kas cukup baik. Berdasarkan SAK EMKM yang tertera pada Laporan Kinerja UMKM, hendaknya tertera Penghasilan (Pendapatan) dan Beban. Artinya UMKM Kerajinan Kulit Masin Warungasem telah memenuhi standar pencatatan Laporan Kinerja pada SAK EMKM. Hasil observasi pada beberapa UMKM Kulit Masin Warungasem, kondisi ini memberikan dampak positif, antara lain sebagai berikut:

1. UMKM Kerajinan Kulit Masin Warungasem telah berhasil mendapatkan bantuan dari Pemerintah untuk penambahan modal usaha selama kondisi Covid 19.
2. UMKM ini mendapatkan kepercayaan untuk memproduksi beberapa produk berupa ikat pinggang untuk pegawai pemerintah daerah dan anggota POLSEK setempat.

Dampak positif ini sesuai dengan hasil penelitian (Luthfiana, 2020), yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pengelolaan kas terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha mereka.

Indikator lain dalam literasi keuangan adalah akses keuangan pada instansi keuangan dan peminjaman modal. Hasil dari penelitian menunjukkan 60% UMKM di Kabupaten Batang, Pekalongan dan Pemalang belum memiliki akses keuangan (Wachyu & Winarto, 2020). Artinya, lebih dari separuh UMKM di daerah tersebut masih terkendala akses, baik untuk transaksi yang praktis maupun peminjaman modal usaha. Kondisi ini secara nyata berpengaruh terhadap kemampuan kredit UMKM yang tercatat dalam Kredit Usaha Rakyat. Evaluasi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang menyebutkan persentase UMKM yang melakukan KUR dinilai sangat rendah pada tahun 2018-2024 (Batang, 2024). Dengan demikian, akses keuangan sangat mempengaruhi keputusan pengambilan kredit (Erviani & Sari, 2023).

Literasi keuangan dinilai tidak dapat dikuasai secara optimal, apabila tidak mengikuti perkembangan zaman. Digitalisasi menjadi salah satu bentuk perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari. Hasil penelitian menyatakan bahwa lebih dari 70% UMKM masih belum memahami digitalisasi. Serupa pada wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa total terdapat 50 UMKM berbasis, dari 55 yang tercatat pada Disperindagkop belum memiliki pembayaran QRIS. Selain itu, hanya 45% UMKM yang telah memasarkan produk melalui e-commerce.

4.2. Peran Pemerintah pada keterlaksanakaan program dalam mengupayakan masa depan keuangan UMKM berbasis OVOP

Temuan mengenai literasi keuangan pada poin sebelumnya, membutuhkan konsep kolaborasi penta helix. Penta helix merupakan kolaborasi lima unsur utama dalam pembangunan, inovasi dan pengembangan daerah, yang terdiri dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan industri, masyarakat serta media (Chamidah et al., 2020). Fokus pada penelitian ini akan mengamati peran pemerintah dalam keterlaksanaan program literasi keuangan pada UMKM berbasis OVOP. Disebutkan pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Departemen Literasi dan Keuangan OJK, 2021) terdapat tiga poin tugas utama pemerintah, yakni (1) Aktif berkoordinasi dalam kegiatan Edukasi Keuangan mulai dari pengumpulan peserta, distribusi materi penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan. (2) Kerjasama dalam penyusunan materi Edukasi Keuangan dan distribusi materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. (3) Kerjasama dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung literasi keuangan.

Peran pemerintah Kabupaten Batang pada beberapa tahun terakhir tercatat cukup baik. Catatan ini dibuktikan selama dua tahun ini melalui upaya pemerintah Kabupaten Batang yang secara aktif menyelenggarakan kegiatan edukasi, literasi dan inklusi keuangan yang bekerjasama dengan instansi keuangan maupun industry. Adapun bukti pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Batang tertera pada Gambar 2 dan 3. Namun yang disayangkan pada kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Batang belum menyertakan hasil evaluasi pengaruh kegiatan tersebut terhadap kemampuan literasi keuangan UMKM. Pasalnya, beberapa UMKM yang mengikuti pelatihan, diberikan wawancara untuk mengukur kemampuan mereka setelah mengikuti kegiatan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum memahami secara detail teknis pembukuan yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan strategi nasional literasi keuangan Indonesia (Departemen Literasi dan Keuangan OJK, 2021), yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan semacam ini hendaknya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Selain itu dalam hal penyediaan materi edukasi literasi keuangan, pemerintah Kabupaten Batang belum membuat panduan sejenis. Sejauh ini menurut Bapelitbang Kabupaten Batang, menyebutkan untuk panduan Edukasi Literasi Keuangan masih dalam proses pengembangan, yang dibantu dengan beberapa pihak akademisi Universitas, seperti UNDIP.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789





Gambar 3. Pelatihan dasar pembukuan keuangan (Pemerintah Kabupaten Batang dan PLTU) (Kutnadi, 2025), Pelatihan Pengembangan UKM (News.bprcentralartha.com, 2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pandemi Covid-19 membawa dampak signifikan terhadap penurunan nilai ekonomi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Batang. Keadaan ini menyebabkan nilai kemiskinan menjadi jauh dari persentase capaian Nasional. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Batang mengembangkan program OVOP guna mendorong kemandirian ekonomi desa melalui produk unggulan lokal. Namun, implementasi program OVOP belum optimal karena keterbatasan modal usaha dan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan menjadi faktor kunci dalam memperbaiki kondisi keuangan UMKM berbasis OVOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 56% UMKM telah memisahkan pencatatan keuangan pemilik dan unit usaha. Namun 60% UMKM belum memiliki akses keuangan, baik akses pada Lembaga keuangan untuk peminjaman maupun digitalisasi keuangan. Sehingga hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi UMKM dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah berperan penting dalam mendukung literasi keuangan melalui program edukasi, regulasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam kerangka penta helix. Beberapa kegiatan pemerintah dalam mendukung edukasi literasi keuangan, sejauh ini dilakukan sebatas sosialisasi. Belum ada program edukasi literasi keuangan yang bersifat berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan secara terbatas pada UMKM berbasis OVOP karena secara evaluasi, UMKM ini memiliki nilai lebih dibandingkan yang lain. Sehingga saran dari peneliti untuk ke depannya perlu menggali informasi selanjutnya untuk keseluruhan UMKM di Daerah tertentu. Selain itu saran yang diajukan peneliti adalah, fokus penelitian ini hanya melihat peran pemerintah, seyogyanya penambahan pihak lain dari penta helix juga diperlukan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Horizon Indonesia berkat dukungan yang diberikan selama proses pelaksanaan penelitian hingga publikasi hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alinsari, N. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Pada Umkm Di Wisata Kuliner Kebon Ayu Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Pembukuan Sederhana. *Jurnal Wicara Desa*, *1*(4), 556–564. https://doi.org/10.29303/wicara.v1i4.3368

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi. (2018). *Kajian Pemetaan dan Identifikasi Peta Jalur Pengembangan OVOP Kabupaten Batang*.

Bapelitbang, B. P. P. dan P. D. K. B. (2015). Kajian Pemetaan dan Identifikasi Peta Jalur Pengembangan OVOP di Kabupaten Batang. *Galang Tanjung*, *2504*, 1–9.

Batang, P. K. (2024). RKPD Kabupaten Batang. In *Pemerintah Kabupaten Batang*.

Berg, B. L. . & H. L. (2009). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Pearson.

Chamidah, N., Putra, A. H. P. K., Mansur, D. M., & Guntoro, B. (2020). Penta helix Element Synergy as an Effort to Develop Tourism Villages in Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *8*(1), 01–22. https://doi.org/10.33096/jmb.v8i1.625

Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, *7*(2), 107–128. https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7

Claymone, Y., & Jaiborisudhi, W. (2011). A study on one village one product project (OVOP) in Japan and Thailand as an alternative of community development in Indonesia: A Perspective on Japan and Thailand. *International Journal of East Asian Studies*, *16*(1), 51–60.

Departem Literasi dan Keuangan OJK. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 378.

Dewi, J., Ningtyas, A., Olivya, A. M., Abdurrahman, U. I. N. K. H., Pekalongan, W., & Kunci, K. (2025). *Stages of Financial Literacy among Women Entrepreneurs in Batang and Pekalongan*. *8*(1), 342–350.

Ekaristi, C. Y. D., Kusumaningrum, H. P., Denis, Aresteria, M., & Purwienanti, E. N. F. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Umkm Kabupaten Batang. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, *4*(3), 587–605. https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i3.2253

Erviani, E. H., & Sari, I. A. (2023). *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Prosedur Kredit dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit di PT. BPR BKK Batang (Perseroda)*. *November*, 1341–1350.

Hidayati, A. (2020). BASED SMES EMPOWERMENT DESIGN AS ECONOMIC MOVEMENT WITH LOCAL WISDOM VALUE. *Utilitas*, *6*, 8–16.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Psak 71. *Jakarta*, *November*, 282. iaiglobal.or.id

Kemendikbudristek. (2024). *Meningkatkan Pemahaman, Keterampilan, dan Kemampuan Pengelolaan Keuangan melalui Literasi Finansial*. Https://Www.Kemdikbud.Go.Id/. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/10/meningkatkan-pemahaman-keterampilan-dan-kemampuan-pengelolaan-keuangan-melalui-literasi-finansial

Kutnadi. (2025). *Pemkab Batang-PLTU berikan pelatihan dasar pembukuan keuangan*. Jateng.Antaranews.Com. https://jateng.antaranews.com/berita/540945/pemkab-batang-pltu-berikan-pelatihan-dasar-pembukuan-keuangan

Layli, M., Firmansyah, F., Wibowo, F. W., Setiorini, K. R., Nurjannah, N., & Indriyani, T. (2024). Diseminasi Literasi Keuangan Sebagai Transisi Peningkatan Potensi Umkm Menghadapi Inklusi Keuangan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *8*(1), 1503. https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.20776

Luthfiana, L. (2020). Pengaruh modal, inovasi dan tingkat pemahaman manajemen keuangan terhadap kinerja UMKM kabupaten Batang. In *IAIN Pekalongan*. IAIN Pekalongan.

Moneysense, T., Education, F., & Committee, S. (2005). Financial Literacy Levels in Singapore, Full Report.pdf. *Media Research Consultants*, *July*, 1–103.

Ndione, J. S., & Suzuki, K. (2019). Beyond the One Village One Product (OVOP) Concept through Design Thinking Approach. *International Journal of Education and Research*, *7*(4), 143–156.

News.bprcentralartha.com. (2024). *Pembkab Batang Gelar Pelatihan Agar UMKM Naik Level*. News.Bprcentralartha.Com. https://news.bprcentralartha.com/2024/10/30/pemkab-batang-gelar-pelatihan-agar-umkm-naik-level/

Noorzhafirah. (2024). *Tingkat Literasi di Asia Tenggara, Indonesia Masuk Nomor Lima*. GoodStats. https://data.goodstats.id/statistic/tingkat-literasi-di-asia-tenggara-indonesia-masuk-nomor-lima-xUn6F

Prakoso, A. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM se-Eks Karesidenan Besuki. *Valid Jurnal Ilmiah*, *17*(2), 151–161.

Rahmawati, D., & Astuti, W. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *9*(1), 12–20.

Rakhmawati, I. (2019). Pemberdayaan UMKM Berbasis "One Village One Product (OVOP)" Sebagai Gerakan Ekonomi Kerakyatan Pada Industri Logam Desa Hadipolo Kudus. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *7*(1), 17. https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i1.4894

Rumbianingrum, W., & Wijayangka, C. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Umkm. Jurnal Manajemen Dan Bisnis. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Almana)*, *2*(3), 156–164. https://media.neliti.com/media/publications/284281-pengaruh-literasi-keuangan-terhadap-peng-84855b2a.pdf

Sriningsih, E., Mustamin, I., & Ramlah. (2024). Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Manajemen. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen Dan Akuntansi*, *3*(3), 1363–1374.

Thanh, L. H., Nhat, L. T., Dang, H. N., Ho, T. M. H., & Lebailly, P. (2018). One Village One Product (OVOP)-A rural development strategy and the early adaption in Vietnam, the case of Quang Ninh Province. *Sustainability (Switzerland)*, *10*(12). https://doi.org/10.3390/su10124485

Veriwati, S., Relita, D. T., & Pelipa, E. D. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi. *JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *6*(1), 43–53. https://doi.org/10.31932/jpe.v6i1.1150

Wachyu, W., & Winarto, A. (2020). Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Menengah (UMKM). Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 3(1), 61–73. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *3*(1), 61–73.

Wijaya, N. D., Habiburahman, H., & Toton, T. (2024). Literasi Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa Mahasiswi Universitas Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *14*(2), 76. https://doi.org/10.36448/jmb.v14i2.3747